

Dana Desa, Kapasitas Kelembagaan, dan Transformasi BUMDes: Studi Komparatif Tata Kelola Ekonomi Desa di Jawa dan Indonesia Timur

Andika¹

¹University of Banten; Email: andika@ugm.ac.id

*Corresponding Author: andika@ugm.ac.id

Citation: Aziz (2026). The Title of Article (Book Antiqua 14pt Bold). *Issues, Methods, and Advances in Engineering Research*, 10(4), xx–xx. <https://doi.org/0000-0000>

Published: 27/04/2026

ABSTRACT

This article examines how institutional capacity shapes the governance performance of village-owned enterprises in two contrasting rural governance contexts in Indonesia: villages in Java and villages in Eastern Indonesia. Using a secondary-data-based comparative case study, this article analyzes village fund policy, village development indicators, and institutional governance literature to explain why similar fiscal instruments may produce different local economic outcomes. The article argues that village funds do not automatically generate economic transformation. Their effectiveness depends on the interaction between institutional capacity, accountability mechanisms, social trust, and local market connectivity. The comparison shows that villages in Java tend to benefit from denser infrastructure, stronger administrative capacity, and closer market integration, while villages in Eastern Indonesia face structural constraints related to geography, administrative capacity, and fragmented economic networks. The novelty of this study lies in its attempt to move beyond fiscal-input explanations by conceptualizing village economic governance as a relational mechanism linking fiscal resources, institutional competence, participatory accountability, and local economic outcomes. The article contributes to politics and governance studies by showing that decentralization outcomes are shaped not merely by fund allocation, but by the governance ecology in which funds are embedded.

Keywords: village governance; village fund; BUMDes; institutional capacity; comparative governance

INTRODUCTION

Desentralisasi fiskal desa merupakan salah satu eksperimen tata kelola paling ambisius di Indonesia pascareformasi. Melalui Dana Desa, negara berupaya memperluas kapasitas pembangunan dari bawah dengan memberikan sumber daya langsung kepada desa. Secara resmi, Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk membiayai pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa (Kementerian Desa, 2026). Portal Sistem Informasi Desa Kementerian Desa masih menempatkan Dana Desa sebagai instrumen utama pembangunan desa yang dapat dipantau berdasarkan realisasi penyaluran per wilayah.

Secara nasional, capaian pembangunan desa menunjukkan kemajuan signifikan. Kementerian Desa menyatakan bahwa jumlah desa mandiri meningkat dari 174 desa pada 2015 menjadi 17.203 desa pada 7 Oktober 2024, sementara Dana Desa disebut sebagai salah satu instrumen utama perubahan tersebut (ANTARA, 2024). Namun, peningkatan agregat tersebut menyembunyikan variasi spasial yang tajam. Desa-desa di Jawa cenderung memiliki akses pasar, jaringan transportasi, dan kapasitas administratif yang lebih kuat, sedangkan banyak desa di Indonesia Timur masih menghadapi kendala geografis, keterisolasian, dan biaya transaksi kelembagaan yang tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan semata jumlah dana, melainkan bagaimana dana tersebut dikelola melalui institusi lokal.

Literatur tentang commons governance menekankan pentingnya aturan lokal, pengawasan bersama, dan mekanisme sanksi dalam mengelola sumber daya bersama (Ostrom, 1990). Dalam konteks tata kelola kolaboratif, efektivitas kebijakan bergantung pada desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses membangun kepercayaan antaraktor (Ansell & Gash, 2008; Emerson et al., 2012). Sementara itu, literatur desentralisasi menunjukkan bahwa transfer fiskal dapat memperkuat demokrasi lokal apabila disertai kapasitas birokrasi dan akuntabilitas warga, tetapi juga dapat memperluas ruang elite capture apabila pengawasan lemah (Faguet, 2014; Bardhan, 2002).

Studi-studi tentang Dana Desa di Indonesia umumnya menunjukkan dua kecenderungan. Pertama, Dana Desa mendorong perbaikan infrastruktur dasar dan memperluas kapasitas belanja desa. Kedua, efektivitasnya tetap sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan, transparansi, dan kapasitas aparatur desa. Namun, banyak studi masih memandang BUMDes sebagai instrumen ekonomi administratif, bukan sebagai arena politik tata kelola tempat kompetisi kepentingan, kapasitas kelembagaan, dan relasi pasar saling berinteraksi. Inilah gap teoritis artikel ini.

Research gap artikel ini terletak pada kurangnya analisis komparatif yang menjelaskan mengapa desain kebijakan fiskal nasional yang seragam menghasilkan variasi outcome ekonomi desa. Gap empirisnya terletak pada kebutuhan membandingkan desa-desa dengan konteks kelembagaan berbeda, khususnya antara Jawa dan Indonesia Timur. Gap teoretisnya terletak pada perlunya model yang menghubungkan fiscal resource, institutional capacity, accountability, dan economic outcome secara terpadu.

Studi ini menawarkan novelty berupa model Fiscal Resource → Institutional Capacity → Participatory Accountability → Village Economic Outcome. Artikel ini berargumen bahwa Dana Desa baru efektif ketika sumber daya fiskal diterjemahkan melalui kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas partisipatif. Tujuan penelitian adalah menjelaskan bagaimana variasi kapasitas kelembagaan membentuk perbedaan kinerja BUMDes dalam konteks desa-desa di Jawa dan Indonesia Timur.

METHODOLOGY

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain secondary-data-based comparative case study. Kasus yang dibandingkan adalah tata kelola ekonomi desa di Jawa dan Indonesia Timur. Pemilihan kasus didasarkan pada logika most-different systems, yaitu dua konteks yang menerima kerangka kebijakan nasional serupa tetapi memiliki kapasitas kelembagaan, infrastruktur, dan keterhubungan pasar yang berbeda. Unit analisis adalah mekanisme tata kelola BUMDes dalam hubungan dengan Dana Desa, kapasitas kelembagaan, partisipasi warga, dan outcome ekonomi lokal.

Data yang digunakan meliputi dokumen kebijakan Dana Desa, laporan Kementerian Desa, publikasi BPS, laporan lembaga internasional tentang tata kelola lokal, dan literatur akademik tentang desentralisasi, governance, dan BUMDes. Karena tidak tersedia data wawancara primer, artikel ini tidak menggunakan kutipan informan. Analisis dilakukan melalui pembacaan komparatif terhadap tiga variabel utama: kapasitas kelembagaan, akuntabilitas partisipatif, dan konektivitas ekonomi lokal. Validasi dilakukan melalui triangulasi sumber antara dokumen pemerintah, laporan lembaga, dan literatur akademik.

RESULTS & DISCUSSION

1. Kapasitas kelembagaan sebagai prasyarat konversi Dana Desa

Temuan utama menunjukkan bahwa Dana Desa memiliki efek berbeda bergantung pada kemampuan desa mengubah sumber daya fiskal menjadi program ekonomi produktif. Di desa-desa Jawa, keberadaan aparatur yang lebih terbiasa dengan administrasi pembangunan, akses ke pendamping, dan kedekatan dengan pasar kabupaten memperbesar peluang BUMDes menjadi unit ekonomi yang berfungsi. Sebaliknya, di banyak desa Indonesia Timur, Dana Desa lebih sering terserap untuk kebutuhan infrastruktur dasar dan pelayanan minimum karena keterbatasan kapasitas kelembagaan.

Temuan ini mendukung argumen Ostrom bahwa aturan formal tidak cukup; efektivitas institusi bergantung pada kemampuan aktor lokal menjalankan aturan, memantau, dan menyesuaikan tata kelola dengan konteks lokal (Ostrom, 1990). Dalam konteks ini, Dana Desa adalah input, bukan outcome. Dengan demikian, mekanisme tersebut dapat dijelaskan sebagai proses konversi kelembagaan: dana publik baru menghasilkan perubahan ekonomi ketika terdapat kompetensi administratif, kepemimpinan lokal, dan sistem pengawasan warga.

2. Akuntabilitas partisipatif dan risiko elite capture

Perbedaan kedua terletak pada kualitas akuntabilitas. Desa dengan musyawarah aktif, transparansi anggaran, dan pengawasan warga cenderung lebih mampu mengarahkan BUMDes pada kebutuhan kolektif. Sebaliknya, desa dengan kontrol sosial lemah lebih rentan menjadikan BUMDes sebagai instrumen elite desa. Literatur tata kelola kolaboratif menekankan bahwa partisipasi bukan sekadar kehadiran formal, tetapi proses deliberatif yang memungkinkan warga memengaruhi keputusan (Ansell & Gash, 2008; Emerson et al., 2012).

Kondisi ini mengindikasikan bahwa masalah BUMDes bukan hanya kapasitas bisnis, tetapi juga kualitas politik lokal. Jika warga tidak memiliki akses terhadap informasi keuangan dan keputusan usaha, BUMDes mudah berubah menjadi lembaga semi-publik yang tertutup. Dengan demikian, akuntabilitas partisipatif berfungsi sebagai mekanisme pengendalian terhadap penyimpangan sekaligus sebagai sumber legitimasi usaha desa.

3. Konektivitas pasar dan variasi outcome ekonomi

Perbedaan paling kuat antara Jawa dan Indonesia Timur adalah konektivitas pasar. Desa di Jawa cenderung lebih dekat dengan pusat konsumsi, jaringan logistik, dan lembaga keuangan. Hal ini membuat unit usaha BUMDes lebih mudah mengembangkan layanan perdagangan, pariwisata lokal, pengelolaan air, atau jasa keuangan mikro. Sebaliknya, desa terpencil di Indonesia Timur menghadapi biaya distribusi tinggi, akses terbatas ke pasar, dan keterbatasan sumber daya manusia.

Temuan ini memperluas teori desentralisasi fiskal. Transfer dana dapat memperkuat pembangunan lokal, tetapi efeknya tidak netral terhadap ruang. Konteks geografis dan struktur pasar membentuk peluang keberhasilan. Dengan demikian, kebijakan BUMDes perlu dibedakan berdasarkan tipologi desa, bukan diseragamkan secara administratif.

Tabel 1. Tabel bukti analitis tata kelola BUMDes

Variabel	Temuan Empiris	Bukti Data/Kutipan	Interpretasi Analitis
Kapasitas kelembagaan	Desa di Jawa relatif lebih mampu mengelola program ekonomi produktif	Peningkatan desa mandiri nasional dari 174 pada 2015 menjadi 17.203 pada 2024 menunjukkan kemajuan agregat, tetapi tidak menghapus variasi wilayah (ANTARA, 2024)	Dana Desa efektif ketika dikonversi oleh kapasitas administratif lokal
Akuntabilitas partisipatif	Musyawarah dan transparansi memperkecil risiko elite capture	Kerangka Dana Desa menempatkan pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu tujuan pembiayaan (Kementerian Desa, 2026)	Partisipasi warga menjadi mekanisme kontrol politik lokal

Konektivitas pasar	Desa dekat pusat ekonomi lebih mudah mengembangkan BUMDes	Perbedaan geografis Jawa dan Indonesia Timur memengaruhi biaya transaksi dan akses pasar	Outcome ekonomi ditentukan oleh relasi antara kapasitas kelembagaan dan struktur pasar
---------------------------	-----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: diolah dari Kementerian Desa (2026), ANTARA (2024), Ostrom (1990), Ansell dan Gash (2008), serta Emerson et al. (2012).

4. Model konseptual

Model yang ditawarkan artikel ini adalah:

Dana Desa → Kapasitas Kelembagaan → Akuntabilitas Partisipatif → Kinerja BUMDes → Outcome Ekonomi Desa

Model ini menunjukkan bahwa Dana Desa tidak bekerja secara otomatis. Dana publik membutuhkan kapasitas kelembagaan untuk diterjemahkan menjadi program, akuntabilitas partisipatif untuk menjaga orientasi publik, dan konektivitas ekonomi untuk menghasilkan outcome produktif.

CONCLUSION

Artikel ini menunjukkan bahwa variasi kinerja BUMDes tidak dapat dijelaskan hanya melalui jumlah Dana Desa. Perbedaan outcome antara desa-desa di Jawa dan Indonesia Timur terutama dibentuk oleh kapasitas kelembagaan, kualitas akuntabilitas partisipatif, dan konektivitas pasar. Studi ini berargumen bahwa Dana Desa merupakan instrumen fiskal yang bersifat enabling, tetapi bukan faktor determinan tunggal transformasi ekonomi desa. Tanpa aparatur yang kompeten, mekanisme pengawasan warga, dan akses pasar yang memadai, BUMDes berisiko menjadi lembaga administratif tanpa produktivitas ekonomi yang kuat.

Kontribusi teoretis artikel ini adalah memperluas kajian desentralisasi fiskal dengan menempatkan governance ecology sebagai variabel mediasi. Secara praktis, artikel ini merekomendasikan kebijakan diferensiasi dukungan BUMDes berdasarkan tipologi kapasitas desa. Desa dengan kapasitas rendah memerlukan pendampingan intensif, integrasi pasar, dan dukungan manajerial; sementara desa dengan kapasitas lebih tinggi dapat diarahkan pada inovasi usaha dan ekspansi jejaring ekonomi lokal. Secara politik, akuntabilitas partisipatif harus diperkuat agar BUMDes tidak menjadi arena dominasi elite desa.

REFERENCES

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). *Collaborative governance in theory and practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- ANTARA. (2024). *Number of independent villages up 17,000 since 2015*.
- Bardhan, P. (2002). *Decentralization of governance and development*. *Journal of Economic Perspectives*, 16(4), 185–205.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). *An integrative framework for collaborative governance*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29.
- Faguet, J. P. (2014). *Decentralization and governance*. *World Development*, 53, 2–13.
- Kementerian Desa. (2026). *Sistem Informasi Desa: Dana Desa*.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons*. Cambridge University Press.
- Torfiging, J., Andersen, L. B., Greve, C., & Klausen, K. K. (2021). *Public governance paradigms*. Edward Elgar.
- World Bank. (2023). *Indonesia public expenditure review and local governance updates*.